



Process of Collaborative Planning

WINNY ASTUTI

MKP COLLABORATIVE HOUSING DEVELOPMENT PLANNING

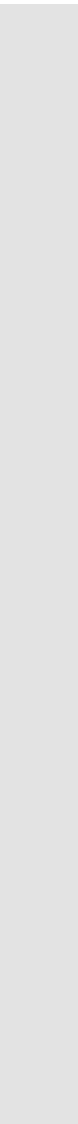
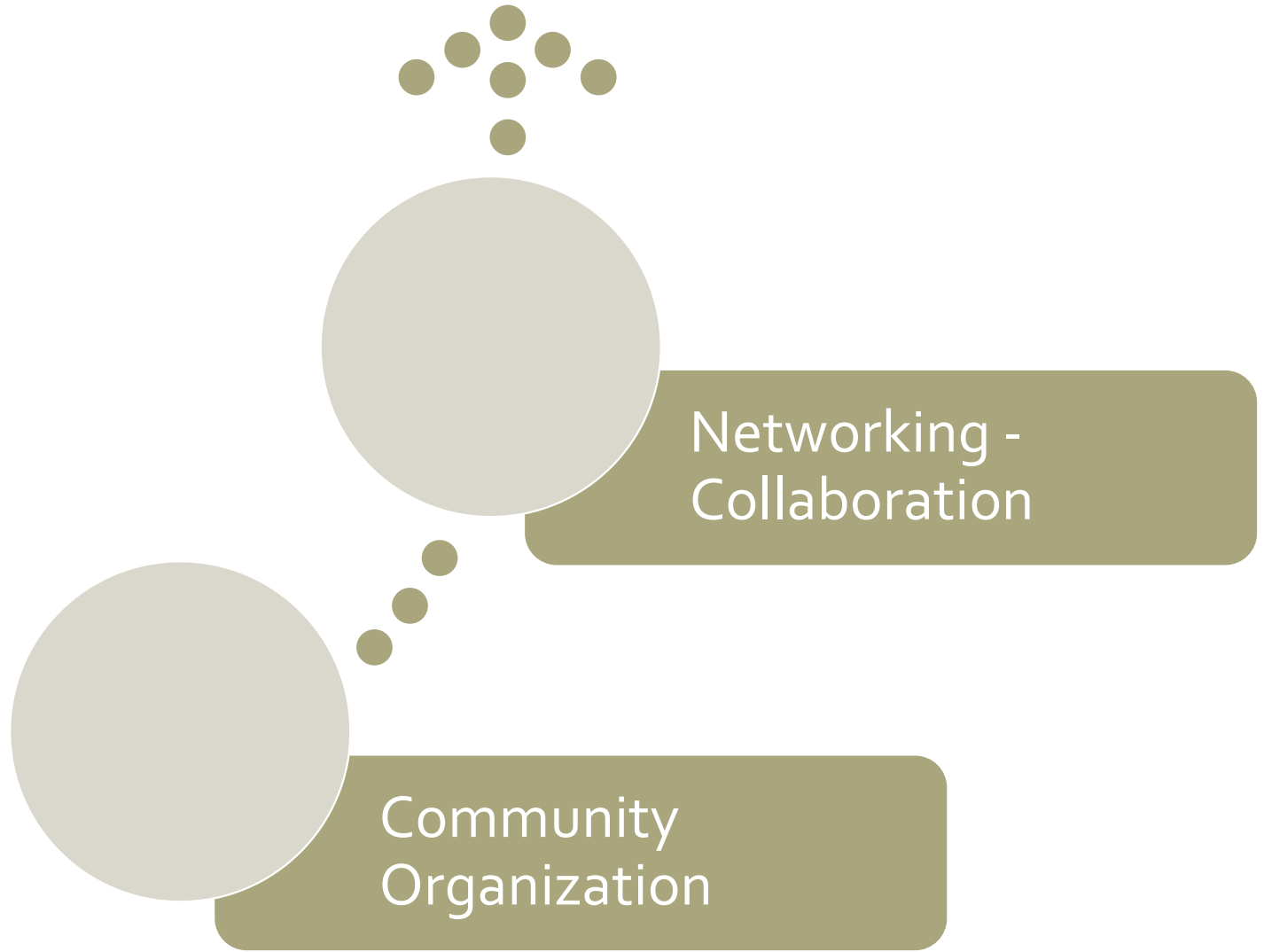
PRODI PWK FT UNS 2020

BACKGROUN G

- Kebutuhan untuk 'shared-power worlds (Bryson and Crosby, dalam healey, 1997)
- The **systems of governance of a society** or community refer to the **processes through which collective affairs** are managed
- *ADANYA Political community bagian dari entitas kolektif yang mempunyai kepentingan umum, masyarakat yang diakui oleh stakeholder*
- Perubahan peran pemerintah dari 'provider state', to that of a 'strategic enabler
- institutional re-design, shifting the hard infrastructure of institutional arrangements, legal rules and resource flows,
- Consensus-building thrives on openness and trust. Expanding networks of collaboration and trust provide a resource of *social and intellectual capital* (Innes *et al.*, 1994; Ostrom, 1990)

Why collaborative Planning?

- The complex interconnections among the activities policy sought to influence
- The effectiveness of policy making activity, rather than the efficiency of the process (Webber, 1978)
- Explicit recognition of the value dimension of problem definition and choice of strategies, rather than leaving values hidden within professional or political assumptions
- The deployment of available knowledge about situations in a systematic way, rather than relying on unreflective anecdote, implicit intuitions and unstructured judgement.



Tahapan Perencanaan berbasis masyarakat
(community organization)



Tahap 1. Seleksi Lokasi/ Wilayah

- Seleksi lokasi dilakukan berdasarkan kriteria –kriteria yang ditetapkan oleh program terkait misalnya :
 - Termasuk wilayah pedesaan atau perkotaan (tergantung nama programnya)
 - Prosentase KK miskin > 10% menurut data PODES
 - Punya Potensi yang dikembangkan
- Kelompok Sasaran :
 - Masyarakat
 - Pemerintah Kota/ Kabupaten
 - Para pemangku keentingan yang lain

Tahap 2. Sosialisasi

- TUJUAN : meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program yang akan dilaksanakan
- Menyiapkan pelaku baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk lebih memahami program melalui :-
 - serangkaian pertemuan
 - serangkaian Pelatihan terkait dengan program
 - serangkaian loby-loby dengan pelaku pembangunan

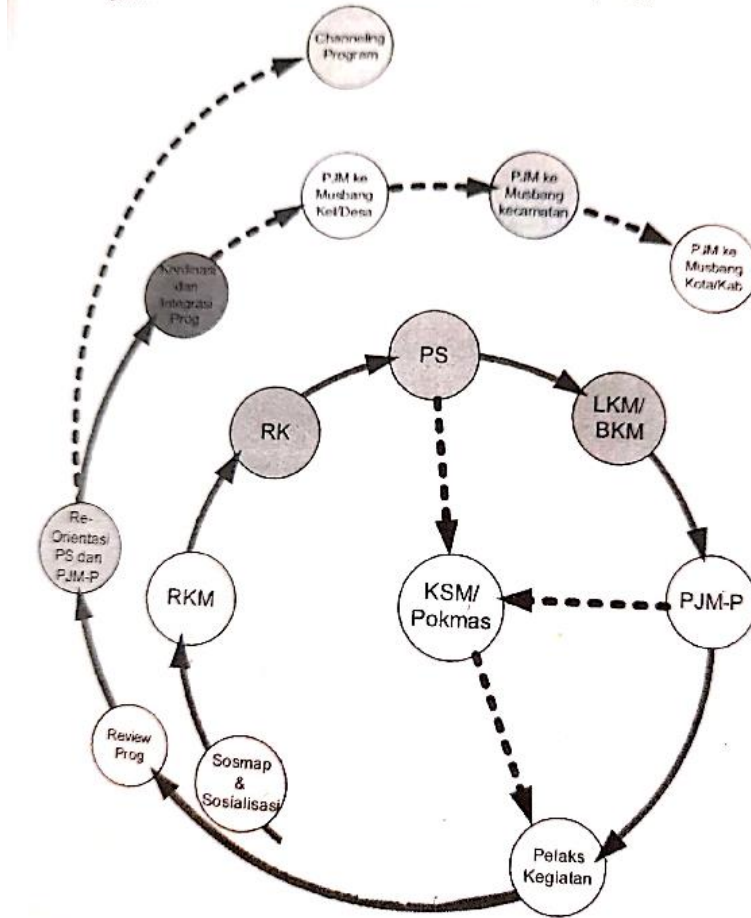
Tahap 3. Proses Perencanaan



Proses Pelaksanaan Kegiatan

(Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2018)

Gambar 3. Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Masyarakat



PNPM Mandiri Perkotaan

Scanned with CamScanner

3.a Mengorganisa sikan Masyarakat

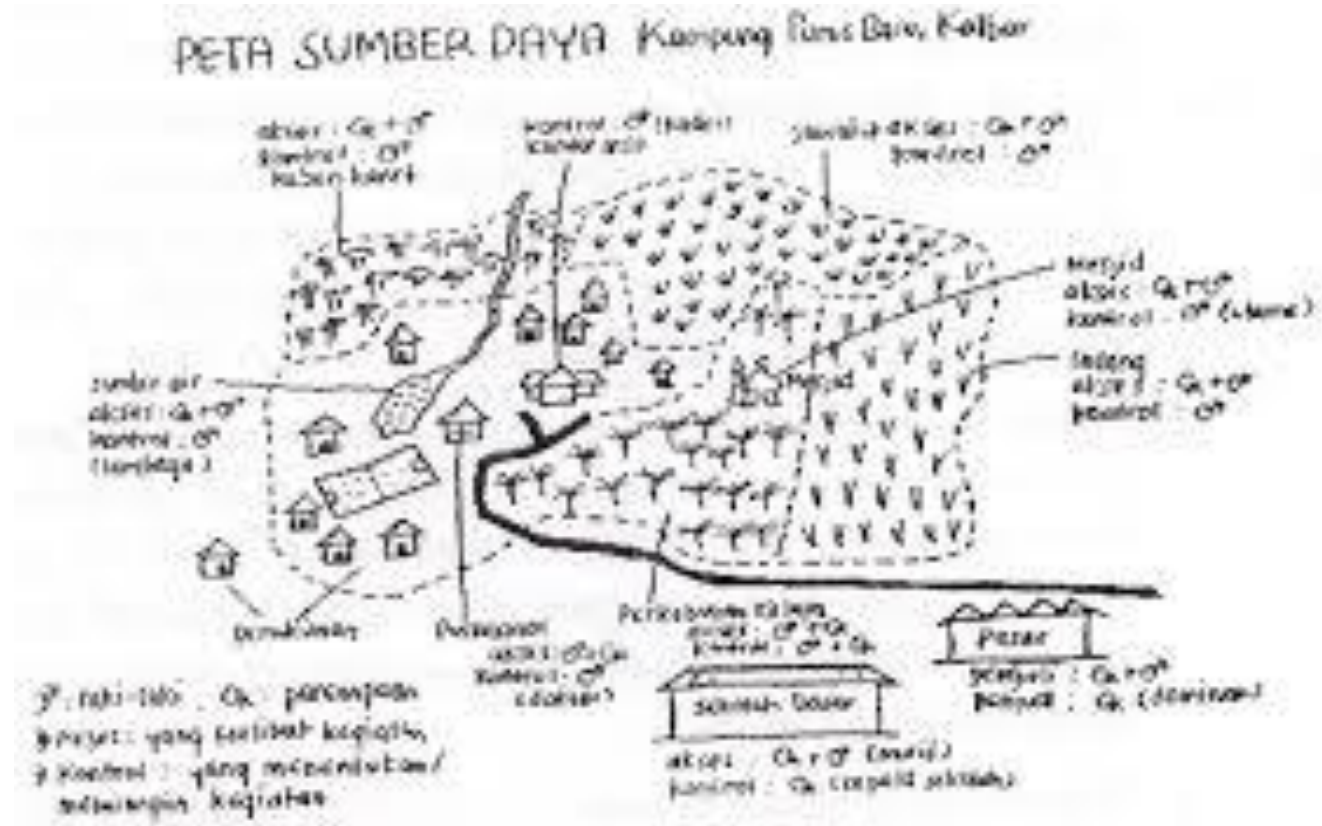
- Pembentukan organisasi Masyarakat di tingkat masyarakat seperti BKM,LKM, Relawan
- Mambangun Kerjasama dengan tim Fasilitator di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan, kota.



3.b Pemetaan Swadaya

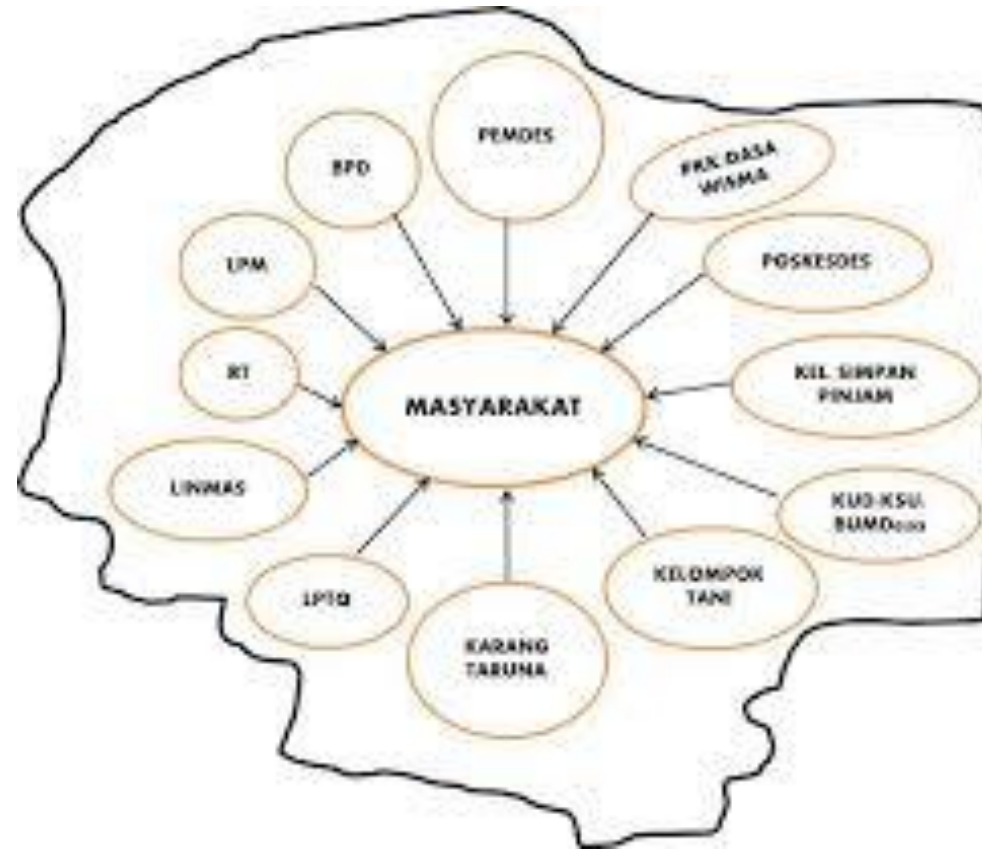
- - Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang pengembangan Kawasan
- - Tujuannya agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisis keadaannya dan mendapatkan gambaran mengenai aspek social, ekonomi dan kelembagaan
- - Pemetaan swadaya dilakukan dengan serangkaian FGD
- - beberapa Teknik pemetaan swadaya yang bisa dilakukan : PETA DESA, KALENDER HARIAN, DIAGRAM VENN, didampingi oleh Fasilitas dan tim penamping Perencanaan
- - peta desa : untuk melihat potensi dan permasalahan Kawasan dari sisi spatial : menyangkut rumah, sarana=prasarana lingkungan
- - Diagram Venn untuk melihat hubungan kelembagaan yang ada di masyarakat
- - Kalender harian untuk melihat pola perilaku masyarakat

Contoh metode sketsa desa



Participatory Rural Appraisal
(AsepMusa.blog.undip.ac.id)

Contoh metode bagan kelembagaan



Desa Mekar Jaya

3. c. Menyusun Rencana Kegiatan kelompok

- Dengan didampingi oleh Tim Fasilitator dan Tim pendamping perencanaan dengan melibatkan Lembaga masyarakat, LKM, pengelola kelurahan, relawan dan stakeholders terkait :
 - Memprioritaskan dan menganalisis masalah- masalah
 - Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik
 - Identifikasi sumber daya yang tersedia untuk pemecahan masalah
 - Pembangunan berbasis Rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya
- Menyusun rencana kegiatan di dalam dokumen Rencana Penataan Kawasan dan membagi peran-peran pelaku

3.d. Menyusun Rencana dan pelaksanaan KEgiatan

- Rencana yang disusun Bersama fasilitator dan pendamping kemudian diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal
- Proses pemilihan pelaksana untuk kegiatan kegiatan besar misalnya perbaikan jalan, pembangunan Gedung dsb
- Termasuk pemantauan pelaksanaan, kemajuan kegiatan untuk menjai perhatian semua pihak

3.e. Monitoring dan evaluasi

- Memantau proses dan hasil kegiatan secara partisipatif (participatory monitoring and evaluation/ PME). PME merupakan proses penilaian, pengkajian, pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya

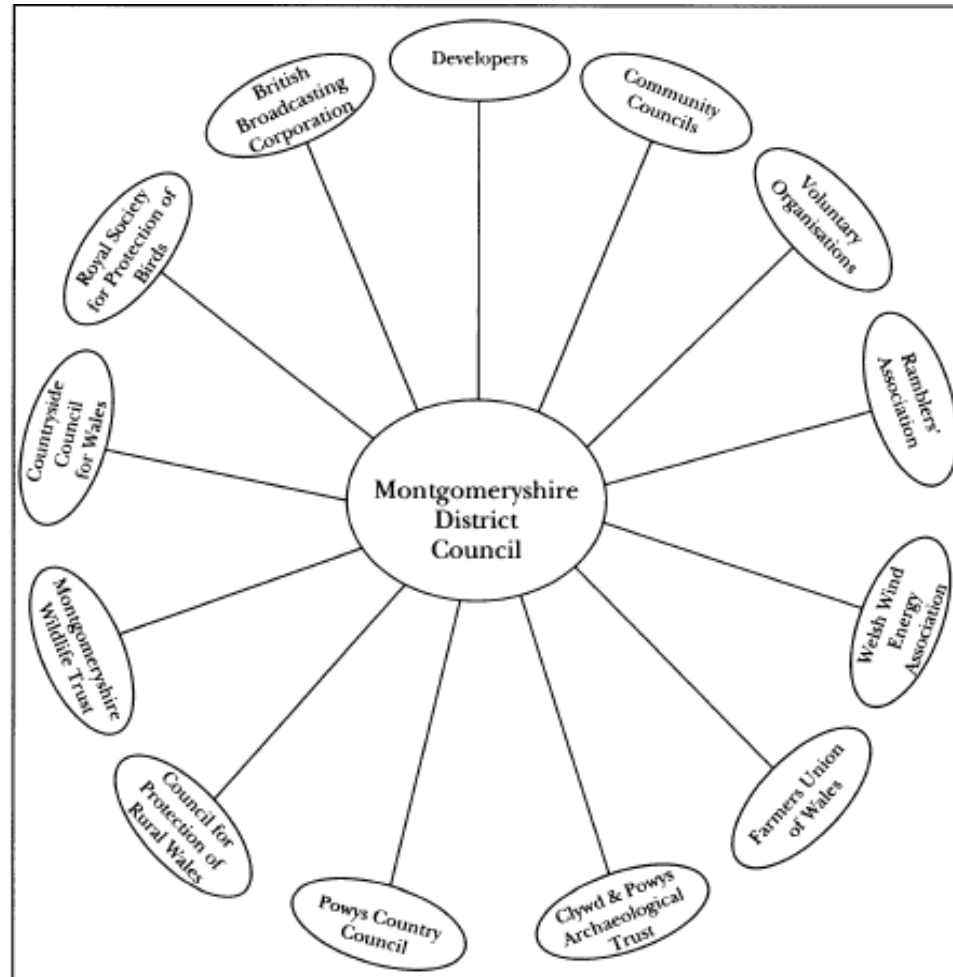
4. Pemandirian Masyarakat

- Pemandirian merupakan salah satu tujuan Pembangunan dan perencanaan berbasis masyarakat
- Butuh waktu yang Panjang (mis 3 tahun) untuk membangun kemandirian dan sustainabilitas Kawasan sehingga masyarakat mampu self organizing.
- Upaya untuk membangun networks dengan external untuk keberlanjutan program dan kegiatan

- BEBERAPA TAHAPAN PEMANDIRIAN MASYARAT (Mardikanto, 2010)
- 1. pembagian wilayah kerja antar pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan (mana yang dilakukan Dinas terkait, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, aktivis dsb)
- 2. Sosialisasi kegiatan hasil perumusan rencana oleh masyarakat
- 3. Penyadaran masyarakat
- 4. Pengorganisasian Masyarakat terkait pengelolaan program dan kegiatan, pemilihan pemimpin , task force, pembagian peran dan tugas dan pengembangan jejaring Kerjasama
- 5. Pelaksanaan kegiatan :pelatihan 2 untuk pelaksanaan program, pembangunan pembangunan fisik, social dan ekonomi sesuai dengan rencana yang ditatapka

Proses Networking and Collaboration

- 6. Advocacy Kebijakan : proses untuk memperoleh dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat (apparat pemerintah, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, pegiat LSM, akademisi, dsb)
- Dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi



AKTIVITAS KELAS

- <https://jamboard.google.com/d/1BBaqoouwUkqaYP4ktDcq9QCZNkSJdBOP7okcvolvAv4/viewer?f=2>



KELOMPOK 2

DEMOCRATIC ASSESSMENT OF COLLABORATIVE PLANNING PROCESSES

Perencanaan Kolaboratif adalah perencanaan yang melibatkan berbagai stakeholder dalam prosesnya.

Perencanaan kolaboratif sering disebut sebagai teori perencanaan yang paling tepat dalam perencanaan masyarakat sebab berfokus pada lembaga yang adil bagi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Artikel Untuk menyajikan kerangka kerja untuk menilai efek demokrasi dari warga yang berpartisipasi dalam perencanaan kolaboratif.

Pertanyaan sentral: Bagaimana kita dapat menilai efek demokrasi dalam perencanaan kolaboratif?

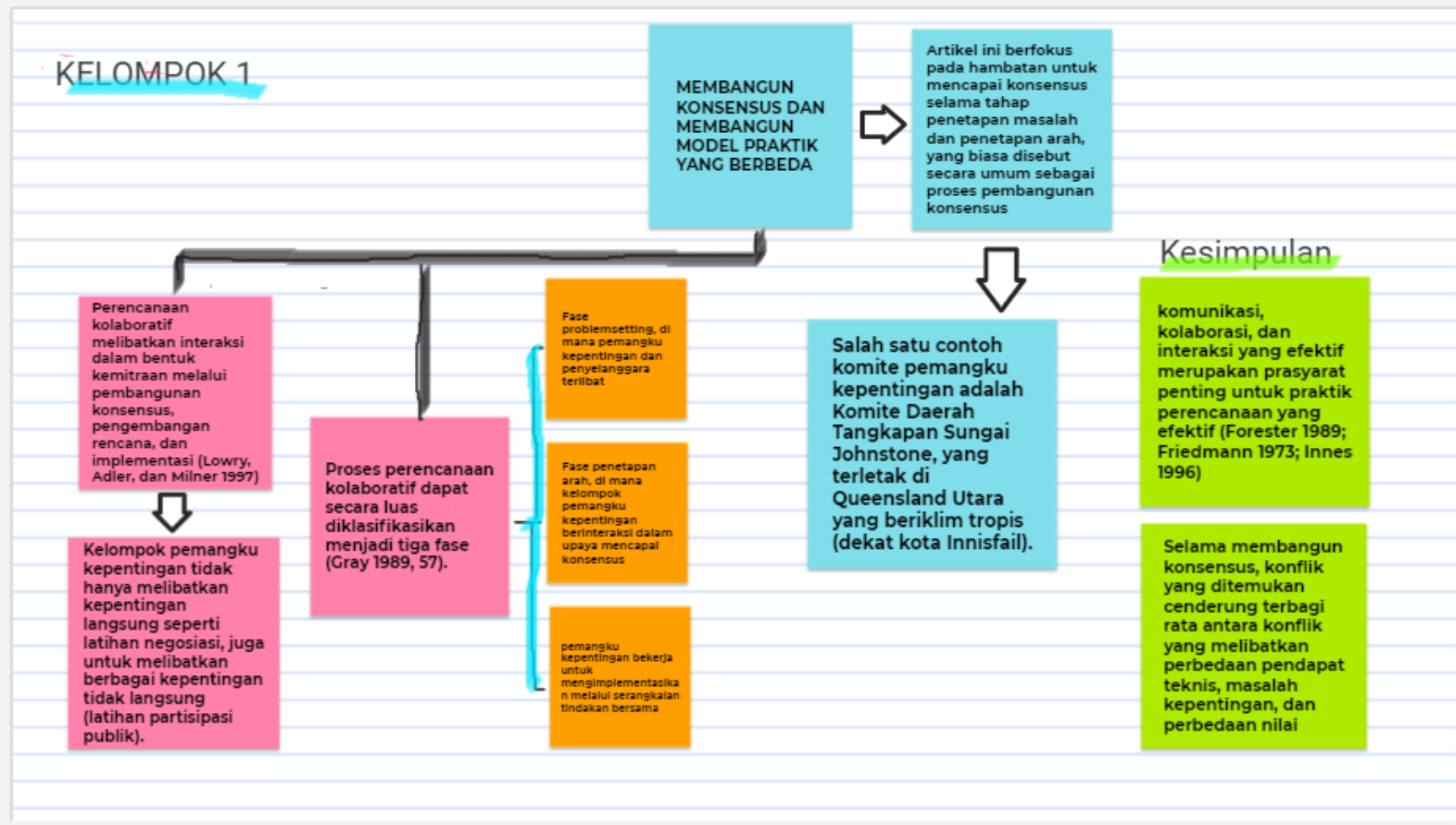
- Kriteria Evaluasi**
1. Akses, Inklusi, Partisipasi
 2. Musyawarah Publik
 3. Demokrasi yang adaptif
 4. Akuntabilitas
 5. Pengembangan Identitas Demokratif

160 Planning Theory 7(2)

BOX 1 Questions for democratic assessments

Noras	Input	Process	Outcome
Access	Who are invited to participate? Which channels for participation exist?	Do the institutional settings for the processes favour some types of participants? Are the processes transparent?	Are the outcomes biased in terms of fulfilling the wishes of only certain groups of participants?
Public deliberation	Are different types of knowledge included in the deliberations?	Are the deliberation processes characterized by reciprocity and tolerance?	To what extent do the debates produce something which is perceived, by the participants, as essential for the decision-making process?
Adaptiveness	Are there clear rules for the network process prior to the deliberative process?	Is the network capable of handling conflicts?	Is the network's work secured sustainability and continuity in terms of e.g. competencies?
Accountability	Is there a clear political mandate from politicians which can be held accountable?	Are the processes transparent?	What are the possibilities for accountability when implementing the outcome of the networks?
Political identities	-	To what extent do the processes of the networks contribute to endowment and	Have the processes contributed to the building of institutional capital





REFERENSI

- Departemen PU Dirjen Cipta Karya . Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008
- Theresia, A, et al. 2014. Pembangunan berbasis Masyarakat- Acuan bagi Praktisi, Akademisi dan Pemerhati Penhgembangan Masyarakat
- **Patsy Healey. 1997. Collaborative Planning Shaping Places in Fragmented Societies. MACMILLAN PRESS LTD**
- Sumber lain



SEKIAN